

**ANALISIS STRATEGI PEMBANGUNAN  
PADA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN DAN HUTAN  
DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG**

THE ANALYSIS OF DEVELOPMENTAL STRATEGY AT THE INDUSTRIAL SECTOR OF THE  
MANAGEMENT OF AGRICULTURAL CULTIVATION AND FOREST TOWARDS THE  
PUBLIC'S INCOME IN TULUNGAGUNG REGENCY

ABSTRACT

By

ALLIFFI KRISDIANTO

Based on the formulation of the problem, then the objectives of the study can be formulated as follows: 1) to understand the role of industrial sectors for the cultivation management of agriculture and forest in order to increase the public's income in Tulungagung Regency, 2) to know and to analyze the strategy of developing industrial sector for the cultivation management of agriculture and forest in order to increase the public's income in Tulungagung Regency. While the field study was done starting from August 3, 2011 to February 2, 2012.

The study is of the descriptive research type, i.e. it does not test hypotheses (non hypothesis research). The study tries to explain clearly the studied problems, i.e. making description, or illustration systematically, factually and accurately relating to facts, and characteristics among the phenomena studied. The data analysis used is SWOT analysis.

The role of the cultivation management of agriculture and forest in supporting the implementation of autonomy in Tulungagung Regency is to develop the strategy of developing the management industry of agricultural cultivation and forest by increasing the quality of various elements in developing the unit of endeavors located in Tulungagung Regency. The most dominant strategy according to SWOT analysis is strategy SO, i.e. to obtain profits from the available strengths to make and to utilize the maximum opportunities by ways of: 1) improving the quality of human resources of the industrial management of agricultural and forest results, 2) utilizing the technological development to increase the industrial product quality of the management of agricultural and forest products, 3) utilizing market information to market industrial product of the management of agricultural and forest results, 4) facilitating the absorption of work force at the industrial management of agriculture and forest products.

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan bidang ekonomi di Indonesia untuk waktu yang akan datang diperkirakan bertumpu pada pembangunan dan pengembangan bidang usaha pada sektor industri yang merupakan sektor dasar bagi sektor – sektor lainnya di bidang ekonomi. Sedangkan pembangunan dan pengembangan pada sektor industri itu merupakan suatu langkah dan fungsi strategis untuk waktu yang akan datang. Pembangunan dan pengembangan

pada sektor – sektor industri itu merupakan suatu langkah dan fungsi strategis untuk waktu yang akan datang. Pembangunan dan pengembangan pada sektor – sektor industri perlu dilakukan secara terus – menerus / berkesinambungan serta terintegrasi untuk mengantisipasi perubahan – perubahan lingkungan usaha yang terus dan selalu bergerak dengan cepat. Sedangkan untuk beberapa waktu yang akan datang, dihadapkan oleh suatu perubahan yang relatif berat, yaitu perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi serta bentuk

lainnya yang mengarah kepada liberalisasi ekonomi dan bisnis, sehingga diperkirakan akan tercipta tingkat persaingan yang semakin kuat dan ketat.

Kartasmita (1997:143) menengarai bahwa kegagalan atau tidak tercapainya sasaran pembangunan pada umumnya maupun pembangunan kehutanan lebih disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dan bahkan banyak kasus menunjukkan bahwa masyarakat menentang upaya pembangunan. Keadaan yang seperti ini disebabkan oleh :

1. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil orang dan tidak menguntungkan rakyat banyak bahkan di sisi ekstrim dirasakan sangat merugikan;
2. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan orang banyak, akan tetapi rakyat kurang memahami maksud dari pembangunan tersebut;
3. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, akan tetapi cara pelaksanaannya kurang sesuai dengan pemahaman tersebut;
4. Pembangunan di pahami akan menguntungkan rakyat tetapi rakyat tidak diikuti sertakan.

Menurut pendapat Tjokrowinoto (1996) mengungkapkan bahwa pembangunan dilihat dari arah konseptual maupun kontekstual selalu tidak dapat dilepaskan dari konsep keterbelakangan dan kemiskinan, dimana pada gilirannya kesemuanya itu adalah bertujuan untuk pengentasan kemiskinan. Dilihat dari sumberdaya manusianya, karakteristik masyarakat yang menyandang kemiskinan adalah : sebagian kepala keluarganya tidak pernah menempuh pendidikan formal, yaitu 60 % adalah tidak bisa membaca atau buta huruf (Priyono dan Pranarka, 1996). Kondisi tersebut menyebabkan sulitnya mereka mencari peluang pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pekerjaan pokok masyarakat ini adalah petani dengan

luas pemilikan lahan rata-rata 0,22 Hektar. Sedangkan pekerjaan sampingan mereka rata-rata buruh tani, tukang kayu, pencari getah dan pencari kayu bakar. Tanggungan keluarga mereka rata-rata 3 sampai dengan 4 orang yaitu anak-anak yang masih sekolah.

Melihat karakteristik masyarakat kurang mampu sebagaimana diungkapkan diatas, tersirat bahwa sebagian besar keluarga tidak mampu mereka yang bertempat tinggal di daerah kawasan hutan atau di daerah pedesaan. Hal ini berarti bahwa kebijakan pembangunan haruslah diarahkan kepada upaya pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan. Di pihak lain masalah yang menghadang keberhasilan program pembangunan di daerah pedesaan menurut Haeruman (2000) adalah sebagai berikut :

1. Adanya ketimpangan proporsi penduduk miskin yang ada di daerah pedesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan, sehingga perkembangan sosial ekonomi di daerah pedesaan relatif tertinggal ;
2. Rendahnya SDM dan sarana prasarana serta sosial ekonomi;
3. Kurang berkembangnya kelembagaan masyarakat di pedesaan;
4. Penurunan kualitas sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.

Adapun permasalahan diatas merepresentasikan sepenuhnya permasalahan aktual dan potensial, namun paling tidak bisa memberikan gambaran kepada kita tentang permasalahan pokok yang menghambat pembangunan di daerah pedesaan. Lebih tegas lagi menurut Haeruman (2000) menyatakan bahwa masalah utama dalam pembangunan di daerah pedesaan adalah rendahnya kemampuan (SDM) pengelolaan sumber-sumber daya pembangunan masyarakat pedesaan yang mengakibatkan tidak adanya atas keberlanjutan proses pembangunan sebagai prasyarat adanya peningkatan kondisi sosial ekonomi

masyarakat di pedesaan. Dengan demikian yang dibangun, menurut Suseno (1995), adalah kondisi dan prasyarat kehidupan dalam masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu sarana yang diperlukan masyarakat itu sendiri, berdasarkan kreatifitas, cita-cita dan usahanya sendiri dapat mengembangkan diri dalam dimensi individual dan sosial, jasmani dan rokhani, duniawi dan religius. Untuk itu supaya dapat survive dan berkembang, manusia membutuhkan dukungan, yaitu mereka perlu dibantu seperlunya dijamin dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Atau dengan rumusan lain, sasaran pembangunan adalah agar masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya.

Dengan perubahan dari masa kemasa, pengertian dari era Orde Baru ke Era Reformasi telah berdampak pada perubahan diberbagai sendi kehidupan sosial ekonomi dan politik, termasuk dalam hal strategi pembangunan. Pada era Orde Baru pemerintah pusat lebih mendominasi strategi perencanaan pembangunan, menggunakan pendekatan top down telah menempatkan pemerintah pusat sebagai agen mudernisasi dan melaksanakan sendiri pembangunan tanpa melibatkan unsur masyarakat setempat, terutama dalam proses perencanaan. Pendekatan ini telah mensubordinasikan konteks daerah terhadap keinginan pemerintah pusat atau lebih mementingkan inisiatif nasional dan mengabaikan inisiatif lokal (Sitorus, 1995). Hal ini juga mengakibatkan program-program pembangunan tidak selalu bersambung dengan kepentingan setiap golongan masyarakat di daerah-daerah pedesaan. Pendekatan pola top-down ini mengandalkan munculnya dampak yang lebih luas atau lebih dikenal dengan istilah trickle down effect, dimana substansinya adalah bahwa dalam rangka mengejar ketertinggalannya atas negara-negara yang sudah maju dengan program percepatan pembangunan melalui pembangunan yang

bertumpu pada percepatan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi, yang hasilnya disamping dapat dinikmati oleh mereka yang secara langsung terkena sasaran tersebut, diharapkan bisa juga menyebar pada masyarakat secara lebih luas (trickle down). Akan tetapi sebagian besar program pembangunan yang menggunakan metode trickle down effect tersebut, perencanaannya dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga karena tidak mengetahui atau tidak mendapatkan informasi yang akurat tentang permasalahan-permasalahan yang ada di daerah, seringkali masalah yang ingin di tangani oleh program pembangunan diamsud tidak sesuai dengan kebutuhan riil yang dirasakan oleh masyarakat di daerah-daerah yang seharusnya juga ikut menikmati hasil pembangunan tersebut (Ismawan, 1992).

Dengan munculnya era reformasi, pendekatan baru dalam pembangunan lebih menekankan partisipasi masyarakat untuk bersatu padu dalam pembangunan yang diarahkan, sehingga perencanaan pembangunan lebih diarahkan pada munculnya ide dari bawah (bottom-up). Hal ini juga ditegaskan oleh Kaho (1991) yang menyatakan bahwa apabila kita berbicara mengenai pembangunan, sesungguhnya yang dibicarakan adalah keterlibatan seluruh masyarakat sebagai sistem terhadap masalah yang dihadapinya dan juga pencarian jawaban atas permasalahan tersebut. Lebih lanjut, Siagian (1991) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat mutlak diperlukan oleh karena mereka itulah yang pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan. Secara etis pembangunan harus memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi sebagai subyek dan bukan sebagai obyek semata, dan hasil-hasil pembangunan harus dipersembahkan oleh dan untuk rakyat (Usman, 1996). Sedangkan secara sosiologi, keberhasilan pembangunan akan ditentukan oleh keterlibatan masyarakat dengan

segala sumberdaya yang dimilikinya (Arif, 2000). Hal ini juga ditegaskan oleh Tjokrowinoto (1998) yang menggambarkan bahwa jika pembangunan terlalu bertumpu pada alokasi dan distribusi dana yang sentralistik maka akan mengurangi kreatifitas dan komitmen masyarakat dan kurang menumbuhkan pembangunan berdasarkan kepercayaan diri serta menimbulkan dependensi masyarakat yang terlalu besar pada pemerintah. Bahkan menurut Suprpto (1996), penekanan alokasi dana yang sentralistik dan berkepanjangan juga akan menimbulkan mentalitas dependensi, memperl lemah prakarsa, mengurangi kreatifitas dan daya inovasi. Dengan demikian mau tidak mau pembangunan yang berorientasi pada masyarakat selayaknya memberikan kesempatan pada setiap anggota masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan sesuai dengan kemampuannya. Syarat dari keikutsertaan seluruh anggota masyarakat, selain peluang dan akses yang sama, juga menyangkut kemampuannya untuk berperan. Konsekuensi logisnya, masyarakat harus berdaya untuk berperan serta dalam pembangunan, sehingga pembangunan harus menggunakan sebuah konsep yang sekaligus bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Atau dengan kata lain pembangunan itu juga berupaya membuat masyarakat mampu mandiri (Sumodiningrat, 1997), dimana masyarakat mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat, tanpa tergantung bantuan dari pihak luar (Depkes & Unicep, 1999).

Namun di pihak lain, dinamika sosial ekonomi yang terjadi di Indonesia dalam dasa warsa terakhir ini justru semakin dipicu lajunya oleh dinamika politik dan krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang. Dengan menurunnya pendapatan masyarakat yang disebabkan kenaikan harga-harga kebutuhan bahan pokok semakin

menambah jumlah masyarakat miskin yang sebagian besar berada di daerah pegunungan atau daerah pedesaan. Indikasi lain yang lebih nyata atas dampak negatif dari dinamika sosial yang terjadi adalah terjadinya penjarahan kayu di Hutan Rakyat maupun Hutan Negara dan daerah Perkebunan di berbagai tempat oleh masyarakat pada akhir-akhir ini. Fenomena tersebut merupakan bukti telah merosotnya perilaku masyarakat yang sangat memprihatinkan terhadap kepedulian kelestarian ekosistem sumberdaya alam, yang harus cepat ditanggulangi lebih serius sebelum dampak yang lebih buruk terjadi.

Atas dasar hal tersebut peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang “ **Analisis Strategi Pembangunan Pada Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian Dan Hutan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kabupaten Tulungagung** ”.

## 1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Memahami peranan sektor industri pengolahan hasil pertanian dan hutan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tulungagung.
2. Mengetahui dan menganalisis strategi pengembangan sektor industri pengolahan hasil pertanian dan hutan di Kabupaten Tulungagung.

## METODE PENELITIAN

### 2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan tujuan dan kerangka pikir maka penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung, Sedangkan penelitian lapangan dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 Februari 2012..

## 2.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang tidak menguji hipotesa (non hipotesa). Penelitian ini berusaha menyajikan secara jelas pokok – pokok persoalan yang diteliti yaitu membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

## 2.3 Teknik Pengambilan Sampling

Teknik pengambilan sampel dalam penulisan ini menggunakan sampel yang disengaja (purposive sample ), hal ini disesuaikan dengan maksud dan tujuan penelitian .

## 2.4 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisa deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisa SWOT. Analisa SWOT dijabarkan dalam empat dimensi, yaitu : strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang) dan threats (ancaman).

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### 3.1. Analisis SWOT

Sumber pendapatan daerah merupakan sumber yang sangat potensial dalam mendukung struktur APBD, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai semua kegiatan yang telah direncanakan terutama dalam hal pembangunan. Konsekuensi dari hal tersebut adalah semua sasaran penerimaan yang telah ditetapkan dalam pos ayat penerimaan harus dapat direalisasikan guna mendukung semua program pembangunan daerah. Namun kenyataannya, kemampuan daerah untuk mencukupi kebutuhannya masih terbatas jika dilihat dari tingkat struktur APBD. Padahal idealnya untuk dapat mandiri sebagaimana diharapkan dalam pelaksanaan otonomi daerah, kontribusi pendapatan daerah dari Dinas – Dinas penghasil sangat besar

dalam menopang APBD. Kondisi tersebut membuktikan bahwa kinerja aparaturnya. Dinas pelaksana sebagai salah satu ujung terdapan dalam penerimaan daerah masih memerlukan optimalisasi pemungutan dan mengkaji kemungkinan menggali sumber baru agar pelaksanaan otonomi daerah benar – benar membawa hasil dengan baik bagi masyarakat. Untuk itu perlu diupayakan usaha – usaha peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penggalan dana dan pengembangan sumber – sumber dana yang berasal dari pengelolaan sumber – sumber pendapatan daerah.

Administrasi penyelenggaraan pemungutan meliputi organisasi dan sumber daya manusia ( SDM ), aparaturnya, system dan prosedur serta fasilitas penyelenggara ( sarana dan prasarana ). Pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung, sebagai suatu organisasi, yang berkenaan dengan strategi pembangunan sektor industri pengolahan hasil pertanian dan hutan, terdapat 4 unsur yang selalu menyertai keberadaannya. Keempat unsur itu terdapat dalam analisa SWOT. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan ( strength ) dan peluang ( opportunities ), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan ( weaknesses ) dan ancaman ( threats ). Proses pengambilan keputusan strategic selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan dan arah kebijakan organisasi, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Kewenangan untuk melakukan prakarsa sendiri merupakan suatu peluang yang harus dimanfaatkan oleh daerah untuk meningkatkan potensi daerah. Hal ini disebabkan karena kewenangan sebagai essensi keberadaan daerah otonom akan kurang berarti jika tidak didukung oleh kemampuan yang dimiliki daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Tulungagung dituntut melakukan upaya positif dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah secara optimal.

Analisis lingkungan internal :

- A. Strength (kekuatan)
1. Tersedianya tenaga kerja yang cukup
  2. Tersedianya bahan baku yang melimpah
  3. Banyaknya industri pengolahan hasil pertanian dan hutan
  4. Pilihan produk bervariasi
  5. Kuantitas produksi cukup tinggi
- B. Weaknesses (kelemahan)
1. Kurangnya sumber daya manusia yang profesional
  2. Teknologi
  3. Terbatasnya modal kerja
  4. Lemahnya promosi
  5. Rasio pembeli rendah
- Analisis lingkungan eksternal :
- A. Opportunities (peluang)
1. Otonomi daerah
  2. Berkembangnya teknologi yang pesat
  3. Terbukanya informasi pasar
  4. Perubahan Pola hidup masyarakat
  5. Pertumbuhan penduduk
- B. Threat (ancaman)
1. Perdagangan bebas dan globalisasi
  2. Masuknya pesaing asing
  3. Krisis moneter yang berkepanjangan
  4. Standarisasi mutu produk
  5. Kepercayaan masyarakat terhadap produk dalam negeri masih rendah

Analisis Faktor Strategi Internal

Tabel 1. Matriks Evaluasi faktor Internal (IFAS)

Faktor – Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
<b>A. STRENGTH (KEKUATAN)</b>			
1. Tersedianya tenaga kerja yang cukup	0,10	4	0,40
2. Tersedianya bahan baku yang melimpah	0,10	3	0,30
3. Banyaknya industri pengolahan hasil pertanian dan hutan	0,20	4	0,80
4. Pilihan produk bervariasi	0,05	2	0,10
5. Kuantitas produksi cukup tinggi	0,05	2	0,10
<b>Jumlah I</b>	<b>0,50</b>		<b>1,70</b>
<b>B. WEAKNESSES (KELEMAHAN)</b>			
1. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang profesional	0,15	1	0,15
2. Teknologi	0,10	2	0,20
3. Terbatasnya modal kerja	0,10	3	0,30
4. Lemahnya promosi	0,10	2	0,20
5. Rasio pembeli rendah	0,05	3	0,15
<b>Jumlah II</b>	<b>0,50</b>		<b>1,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,00</b>		<b>2,70</b>

Analisis Faktor Strategi Eksternal

Tabel 10. Matriks Evaluasi faktor Eksternal (EFAS)

Faktor – Faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
<b>A. OPPORTUNITIES (PELUANG)</b>			
1. Otonomi daerah	0,15	3	0,45
2. Berkembangnya teknologi yang pesat	0,10	4	0,40
3. Terbukanya informasi pasar	0,20	4	0,80
4. Perubahan Pola hidup masyarakat	0,10	2	0,20
5. Pertumbuhan penduduk	0,05	2	0,10
<b>Jumlah I</b>	<b>0,60</b>		<b>1,95</b>
<b>B. THREATS (ANCAMAN)</b>			
1. Perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi	0,15	1	0,15
2. Masuknya pesaing asing	0,05	3	0,15

3.	Krisis moneter yang berkepanjangan	0,05		
4.	Standarisasi mutu produk	0,05	2	0,10
5.	Kepercayaan masyarakat terhadap produk dalam negeri masih rendah	0,10	3	0,15
			1	0,10
Jumlah II		0,60		0,65
TOTAL		1,00		2,60

### 3.2. EVALUASI HASIL FAKTOR STRATEGIS

Dari hasil pemilihan faktor strategis SWOT berdasarkan proses pengambilan keputusan strategis, maka diperoleh faktor – faktor strategi internal maupun eksternal. Untuk faktor strategi internal, variable yang bersifat positif ( semua variable yang masuk kategori kekuatan ) diberi nilai mulai dari +1 sampai dengan +4 ( sangat baik ). Sebaliknya, semua variable yang masuk kategori kelemahan maka akan terdapat pada rating +1 bila bernilai sangat baik. Sedang untuk faktor strategi eksternal diambil dari perhitungan rating untuk faktor peluang bersifat positif (peluang yang semakin besar diberi rating + 4, tetapi jika peluangnya kecil, diberi rating + 1 ). Sebaliknya, semua variable yang masuk kategori ancaman maka akan terdapat pada rating +1 bila bernilai sangat baik.

#### Faktor strategi internal :

Strengths ( kekuatan ) :

1. Tersedianya tenaga kerja yang cukup ( rating 4 )
2. Banyaknya industri pengolahan hasil pertanian dan hutan ( rating 4 )

Weaknesses ( kelemahan ) :

1. Kurangnya SDM yang profesional ( rating 1 )
2. Lemahnya promosi ( rating 2 )

#### Faktor strategi eksternal :

Peluang :

1. Perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi ( rating 1 )
2. Berkembangnya teknologi yang pesat ( rating 4 )

Ancaman :

1. Perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi ( rating 1 )
2. Kepercayaan masyarakat

terhadap produk dalam negeri masih rendah ( rating 1 )

Dari hasil evaluasi strategi, dibuat strategi pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan hutan di Kabupaten Tulungagung dalam melakukan evaluasi faktor strategis yang dituangkan dalam matriks SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dalam mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan hutan dengan disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

Matriks ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis, yaitu :

- I. Strategi SO : strategi memanfaatkan seluruh kekuatan untuk membuat dan memanfaatkan peluang sebesar – besarnya, antara lain :

1. Memperbaiki kualitas SDM ( Sumber Daya Manusia ) tenaga kerja pada industri pengolahan hasil pertanian dan hutan
  - Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kualitas produk industri pengolahan hasil pertanian dan hutan
  - Memanfaatkan informasi pasar untuk memasarkan produk
  - Memfasilitasi penyerapan tenaga kerja pada industri

- pengolahan hasil pertanian dan hutan
- II. Strategi ST : strategi menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman , antara lain :
- 1 Menciptakan jaringan kerja antar pengusaha dalam menghadapi perdagangan bebas
  - 2 Meningkatkan kualitas produk industri untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produksi dalam negeri
  - 3 Meningkatkan kualitas produk sesuai standart mutu yang ada.
- III. Strategi WO : strategi pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada antara lain :
- 1 Penyuluhan dan pengenalan teknik produksi terhadap teknologi baru sehingga kualitas SDM
  - 2 Meningkatkan tenaga kerja
  - 3 Memberikan fasilitas kredit murah untuk mengatasi problem terbatasnya modal kerja
  - 3 Menambah modal kerja untuk mengaplikasikan teknologi yang lebih maju.
- IV. Strategi WT : strategi yang berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman, antara lain :
- 1 Meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja pada industri pengolahan hasil pertanian dan hutan
  - 2 Mengembangkan teknologi untuk meningkatkan kualitas produk agar sesuai standar mutu produk
  - 3 Mempermudah akses pasar dengan mengikuti pameran.
- 4

Tabel 2. Matriks SWOT

<b>IFAS</b>          <b>EFAS</b>	<b>Strengths ( S )</b>	<b>Weaknesses ( W )</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya tenaga kerja yang cukup</li> <li>2. Tersedianya bahan baku yang melimpah</li> <li>3. Banyaknya industri pengolahan hasil pertanian dan hutan</li> <li>4. Pilihan produk bervariasi</li> <li>5. Kuantitas produksi cukup tinggi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya SDM yang profesional</li> <li>2. Teknologi</li> <li>3. Terbatasnya modal kerja</li> <li>4. Lemahnya promosi</li> <li>5. Rasio pembeli rendah</li> </ol>
	<b>Strategi SO</b>	<b>Strategi WO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otonomi daerah</li> <li>2. Berkembangnya teknologi yang pesat</li> <li>3. Terbukanya informasi pasar</li> <li>4. Perubahan pola hidup masyarakat</li> <li>5. Pertumbuhan penduduk</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Memperbaiki kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) tenaga kerja pada industri pengolahan hasil pertanian dan hutan</li> <li><input type="checkbox"/> Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kualitas produk industri pengolahan hasil pertanian dan hutan</li> <li><input type="checkbox"/> Memanfaatkan informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Penyuluhan dan pengenalan teknik produksi terhadap teknologi baru sehingga kualitas SDM tenaga kerja meningkat</li> <li><input type="checkbox"/> Memberikan fasilitas kredit murah untuk mengatasi problem terbatasnya modal kerja</li> <li><input type="checkbox"/> Menambah modal kerja untuk mengaplikasikan teknologi</li> </ul>

	<p>pasar untuk memasarkan produk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Memfasilitasi penyerapan tenaga kerja pada industri pengolahan hasil pertanian dan hutan</li> </ul>	gi yang lebih maju.
<p><b>Treath ( S )</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi</li> <li>2. Masuknya pesaing asing</li> <li>3. Krisis moneter yang berkepanjangan</li> <li>4. Standarisasi mutu produk</li> <li>5. Kepercayaan masyarakat terhadap produk dalam negeri masih rendah</li> </ol>	<p><b>Strategi ST</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Menciptakan jaringan kerja antar pengusaha dalam menghadapi perdagangan bebas</li> <li><input type="checkbox"/> Meningkatkan kualitas produk industri untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produksi dalam negeri</li> <li><input type="checkbox"/> Meningkatkan kualitas yg ada.</li> </ul>	<p><b>Strategi WT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja pada industri pengolahan hasil pertanian dan hutan</li> <li><input type="checkbox"/> Mengembangkan teknologi untuk meningkatkan kualitas produk agar sesuai standar mutu produk</li> <li><input type="checkbox"/> Mempermudah akses pasar dengan mengikuti pameran.</li> </ul>

Berdasarkan pengelompokan dari matriks SWOT, maka dapat ditentukan dan dipilih 4 ( empat ) alternative terbaik guna mencapai sasaran strategis yang

menjadi prioritas yang diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan industri hasil pertanian dan hutan yaitu :

Tabel 3. Pilihan Strategi yang paling Dominan

<p><b>SO</b> ( 1,70 + 1,95 ) = 3,65</p>	<p><b>WO</b> ( 1,00 + 1,95 ) = 2,95</p>
<p><b>ST</b> ( 1,70 + 0,65 ) = 2,60</p>	<p><b>WT</b> ( 1,00 + 0,65 ) = 1,65</p>

Berdasarkan matriks pilihan strategi yang paling dominan, maka strategi yang digunakan adalah SO : strategi memanfaatkan seluruh kekuatan untuk membuat dan memanfaatkan peluang sebesar – besarnya, dengan cara :

1. Memperbaiki kualitas SDM ( Sumber Daya Manusia ) tenaga kerja pada industri pengolahan hasil pertanian dan hutan
2. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kualitas produk industri pengolahan hasil pertanian dan hutan
3. Memanfaatkan informasi pasar untuk memasarkan produk industri pengolahan hasil pertanian dan hutan
4. Memfasilitasi penyerapan tenaga kerja pada industri pengolahan hasil pertanian dan hutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melalui proses analisis dan pembahasan terhadap strategi pembangunan industri pengolahan hasil pertanian dan hutan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tulungagung, baik dengan analisis deskriptif maupun analisis SWOT maka diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut :

### 4.1. Kesimpulan

Peranan industri pengolahan hasil pertanian dan hutan dalam menopang pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Tulungagung adalah mengembangkan strategi pembangunan industri pengolahan

hasil pertanian dan hutan dengan cara meningkatkan kualitas berbagai elemen dalam mengembangkan unit usaha yang terdapat di Kabupaten Tulungagung.

Strategi yang paling dominan berdasarkan matriks SWOT adalah strategi SO yaitu memanfaatkan kekuatan yang ada untuk membuat dan memanfaatkan peluang yang sebesar – besarnya dengan cara :

1. Memperbaiki kualitas SDM ( Sumber Daya Manusia ) tenaga kerja pada industri pengolahan hasil pertanian dan hutan
2. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kualitas produk industri pengolahan hasil pertanian dan hutan
3. Memanfaatkan informasi pasar untuk memasarkan produk industri pengolahan hasil pertanian dan hutan
4. Memfasilitasi penyerapan tenaga kerja pada industri pengolahan hasil pertanian dan hutan

#### 4.2. Saran - saran

- Perlunya meningkatkan sumber daya manusia dengan melakukan pembinaan untuk meningkatkan pembangunan industri pengolahan hasil pertanian dan hutan
- Perlunya menerapkan strategi pembangunan industri pengolahan hasil pertanian dan hutan dengan menggunakan strategi SO yaitu dengan jalan meningkatkan

kualitas produk industri pengolahan hasil pertanian dan hutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Koentjoroningrat, 1981, METODE – METODE PENELITIAN MASYRAKAT, Cetakan 4, Penerbit Gramedia, Jakarta
- Mubyarto , PROSPEK OTONOMI DAERAH DAN PEREKONOMIAN INDONESIA PASCA KRISIS EKONOMI, BPFE Yogyakarta
- Nasir, Moh, 1998, METODE PENELITIAN, Ghalian Indonesia, Jakarta.
- Rangkuti Fredi, 2001, ANALISIS SWOT TEKNIK MEMBEDAH KASUS BISNIS, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sonarko, 1998, KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH , CV. Papyrus, Surabaya.
- Sunyoto, Agus, 1995. MODUL MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA, IPWI, Jakarta.
- Tulus T. H. Tambunan, 1996, PEREKONOMIAN INDONESIA, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Winarno Surakhmad, DASAR DAN TEKNIK METODE PENELITIAN ILMIAH, Penerbit CV. Tarsito,